

**KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
(STUDI KASUS DI BP3K HARAU DAN BP3K LAREH SAGO HALABAN)**

**Jhony Hendra<sup>1</sup>, Eri Gas Ekaputera<sup>2</sup>, Hery Bachrizal Tanjung<sup>3</sup>**

<sup>1,2)</sup> Prodi. Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Program Pascasarjana Unand  
Email Korespondensi: jhonyhendra@yahoo.com

**Abstract :** *The performance given by BP3K in carrying out its duties and functions can illustrate its role in facilitating the implementation of agricultural counseling in the District area, especially in the Lima Puluh Kota Regency. This study aims to explain the performance and factors related to the performance of BP3K Haraud and BP3K Lareh Sago Halabandalam in carrying out the duties and functions of the Minister of Agriculture. 26 of 2012. The research was conducted in January 2016-April 2017 at BP3K Harau and BP3K Lareh Sago Halaban. The approach used is qualitative with the type of case study research. The informants of this study were 14 people who came from civil servants, THL extension staff at BP3K Harau and BP3K Lareh Sago Halaban, 28 people who were Farmer Group Managers, Community Leaders and were taken using the snow ball purposive technique. Data collected by observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique used is qualitative data analysis with analysis tools of narrative and interpretation data analysis. The conclusions obtained from this research are: Performance of BP3K Harau and BP3K Lareh Sago Halaban in carrying out their duties and functions based on the mandate of Permentan Number 26 of 2012 is in a condition that is still low, seen only one of the tasks and functions that can be carried out properly is to facilitate the preparation of sub-district agricultural extension programs while the other cannot be carried out properly by the two BP3Ks. Several factors that led to the low performance include: a) Internal factors such as the limited competency of the Agricultural Extension HR in both BP3Ks and the lack of support for facilities, agricultural extension infrastructure owned by the two BP3Ks; b) External factors such as funding support for agricultural extension services by local governments and support from the main actors (farmers) in the implementation of agricultural extension in the BP3K working area.*

**Keywords:** *performance, agricultural extension facilities, the cost of agricultural extension services Agricultural Extension HR*

**Abstrak :** Kinerja yang diberikan BP3K dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat menggambarkan peranannya dalam memfasilitasi terselenggaranya penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan, terutama di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja dan faktor yang berkaitan dengan kinerja BP3K Haraudan BP3K Lareh Sago Halabandalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2012. Penelitian dilaksanakan pada Januari 2016-April 2017 di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian ini sebanyak 14 orang yang berasal dari penyuluh PNS, Penyuluh THL di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban, 28 orang yang merupakan Pengurus Kelompok Tani, Tokoh masyarakat dan diambil dengan teknik *purposive* dan *snow ball*. Data dikumpulkan dengan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan alat analisisnya analisis data narasi dan interpretasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: Kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan amanat Permentan Nomor 26 Tahun 2012 berada pada kondisi yang masih rendah, terlihat hanya satu dari tugas dan fungsi yang dapat dijalani dengan baik yaitu memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan sedangkan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua BP3K. Beberapa faktor yang membuat rendahnya kinerja tersebut, diantaranya adalah: a) Faktor internal seperti masih terbatasnya kompetensi SDM Penyuluh Pertanian yang ada di kedua BP3K dan masih minimnya dukungan sarana, prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh kedua BP3K tersebut; b) Faktor eksternal seperti dukungan pembiayaan penyuluhan pertanian oleh pemerintah daerah dan dukungan dari pelaku utama (petani) dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah kerja BP3K.

**Kata kunci:** kinerja, sarana penyuluhan pertanian, biaya penyuluhan pertanian SDM Penyuluh Pertanian.

## A. PENDAHULUAN

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dulunya hanya terdiri dari subsistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Kelembagaan penyuluhan dapat membantu fungsi dari penyuluhan pertanian, seperti menjadi alat yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian, komunikasi pertanian dan juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat petani (Soekartawi, 2005; Mardikanto, 2009).

Salah satu mata rantai lembaga penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat dan berada di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Sehubungan dengan topik penelitian, kelembagaan penyuluhan pertanian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K). BP3K memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan (UUSP3K). BP3K sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan, berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya.

BP3K merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan BP3K untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus berdasarkan ketetapan atau keputusan Bupati/Walikota. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan, sarana prasarana,

pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat agar kinerjanya dapat tepat guna (efektif) dan berhasil guna (efesien) dalam pencapaian tujuannya.

Secara empiris, menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (2014), keberadaan BP3K umumnya masih belum dapat melaksanakan tugas fungsinya secara optimal, disebabkan antara lain (a) terbatasnya dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan, (b) terbatasnya fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi, (c) terbatasnya jumlah dan kualitas penyuluh, dan (d) terbatasnya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, dan (e) terbatasnya fasilitasi proses pembelajaran (percontohan dan model usaha tani). Pembuktian secara empiris mengenai kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan, sebelumnya telah dilaksanakan oleh Lesmana (2007), dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa BP3K yang ada di Kota Samarinda makadiperoleh hasil bahwa kinerja BP3K KotaSamarinda dilihat dari indikator responsivitas, tanggungjawab dan kualitas pelayanannya berada pada kategori sedang (88 % atau 22 dari 25 responden).

Mengacu pada hasil kajian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (2014), maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat kinerja BP3K dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang murni sesuai aturan berlaku di Sumatera Barat, hanya terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana di daerah ini kelembagaan penyuluhan pertaniannya cukup lengkap, mulai dari tingkat Kecamatan (BP3K) hingga ke tingkat Kabupaten (BP4K).

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menjelaskan kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 22 Tahun 2012; 2) Menjelaskan faktor yang berkaitan dengan kinerja BP3K untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 22 Tahun 2012. Melalui kedua tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kondisi kinerja BP3K di lokasi studi kasus dalam membantu tercapainya tujuan penyuluhan pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian terhitung dari Januari 2016-April 2017 di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang merupakan penyuluh PNS, Penyuluh THL di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban, 28 orang yang merupakan Pengurus Kelompok Tani, Tokoh masyarakat dan diambil dengan pendekatan *purposive* dan *snow ball*. Keseluruhan data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan alat analisisnya analisis data narasi dan interpretasi. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengumpulan keputusan/verifikasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi.**

Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan (BP3K) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil usaha yang dilakukan oleh penyuluh yang bertugas dalam struktur lembaga BP3K untuk menjalankan tugas serta fungsinya

berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2012. Adapun fungsi BP3K menurut Permentan tersebut adalah tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas BP3K yang terdiri dari:

### 1. Kinerja dalam Menyusun program tingkat kecamatan.

Kinerja kedua BP3K di lokasi Studi Kasus untuk penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan berada pada kondisi baik. Hal ini dikarenakan setiap tahun dilaksanakan oleh pihak BP3K baik yang berlokasi di Kecamatan Harau maupun Kecamatan Lareh Sago Halaban. Ada empat kegiatan yang dilalui untuk menghasilkan dokumen program penyuluhan pertanian kecamatan dan keseluruhan kegiatan tersebut harus difasilitasi oleh pihak BP3K setempat. Pemfasilitasian kegiatan tersebut merupakan wujud dari tugas dan fungsi BP3K yang telah diatur dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2012. Melalui tabel berikut dapat terlihat kondisi kinerja kedua BP3K di Lokasi studi kasus.

**Tabel 1. Rangkuman Pernyataan Penting Informan tentang Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan di BP3K Harau dan Lareh Sago Halaban.**

| No | Kegiatan yang Difasilitasi BP3K | Rangkuman Pernyataan Penting dari Informan di BP3K Harau  |   |   | Rangkuman Pernyataan Penting dari Informan di BP3K Lareh Sago Halaban   |  |   |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|
|    |                                 | Informan dari Pengurus Kelompok Tani & Pelaku Usaha Pertanian   | Informan dari Tokoh Masyarakat  | Informan dari Penyuluh  | Informan dari Pengurus Kelompok Tani & Pelaku Usaha Pertanian   | Informan dari Tokoh Masyarakat   | Informan dari Penyuluh  |
| 1. | Pengidentifikasi masalah        | <p>a) Perwakilan dari kelompok tani di undang oleh BP3K untuk dapat terlibat dalam kegiatan pengidentifikasi masalah pertanian.</p> <p>b) Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BP3K.</p> <p>c) Peserta mendapatkan konsumsi dalam kegiatan ini.</p> <p>d) Peserta diberikan sosialisasi kegiatan dari pihak BP3K</p> | <p>a) Saya pernah terlibat dalam kegiatan pengidentifikasi masalah pertanian yang terjadi di wilayah tempat tinggal saya.</p> <p>b) Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BP3K.</p> <p>c) Panitia menyediakan makanan ringan, minum, dan makan siang.</p> | <p>Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun oleh BP3K.</p> <p>Fasilitas yang disediakan berupa ruangan, sarana tulis menulis, proyektor, laptop dan konsumsi.</p> | <p>a) Pada umumnya ketua kelompok tani diundang oleh penyuluh untuk terlibat dalam kegiatan ini setiap tahunnya.</p> <p>b) Tempat pelaksanaanya di ruang pertemuan Kantor BP3K.</p> <p>c) Biasanya ruangan yang digunakan telah dilengkapi oleh kebutuhan pertemuan.</p> <p>d) Kami diberi konsumsi oleh pihak penyelenggara.</p> | <p>a) Terkadang pihak pemerintah nagari mengutus kami dalam kegiatan ini.</p> <p>b) Fasilitas yang disediakan, seperti pertemuan biasa yang sering kami ikuti.</p> | <p>a) Kegiatan ini terselenggara satu kali dalam satu tahun.</p> <p>b) Peserta diberikan fasilitas konsumsi dari pihak BP3K.</p> <p>c) Ruangan dan sarana pertemuan difasilitasi oleh BP3K.</p> <p>d) Peserta diberikan sosialisasi kegiatan.</p> |

|    |   |   |   |  |   |   |  |
|----|---|---|---|--|---|---|--|
| 2. | Pelaksanaan Mimbar Sarasehan                        | <p>a) Perwakilan kelompok tani diundang oleh BP3K melalui Penyuluh yang bertugas di wilayah Nagari.</p> <p>b) Saran dan masukan peserta diminta saat kegiatan ini berlangsung.</p> <p>c) Tempat pelaksanaan disediakan oleh pihak BP3K lengkap dengan sarana untuk pertemuan.</p> <p>d) Setiap peserta mendapatkan konsumsi dari pihak panitia.</p> | Tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. | <p>a) Kegiatan ini lanjutan dari kegiatan pengidentifikasian masalah.</p> <p>b) Hampir setiap tahun kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak BP3K.</p> <p>c) Tujuan diakannya kegiatan ini untuk mengambil kesepakatan bersama dengan pihak terkait mengenai program pemerintah yang akan dilaksanakan di WKPP.</p> <p>d) Peserta kegiatan terdiri dari petani, pelaku usaha pertanian dan perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten.</p> <p>e) BP3K memfasilitasi kegiatan berupa ruangan pertemuan, sarana pertemuan dan konsumsi peserta.</p> | <p>a) Pengurus kelompok tani yang mewakili petani dalam kegiatan ini.</p> <p>b) Kegiatan difasilitasi oleh BP3K, berupa ruangan, sarana pertemuan dan konsumsi peserta.</p> <p>c) Biasanya kegiatan dilakukan setelah beberapa minggu pelaksanaan pengidentifikasian masalah selesai dilaksanakan.</p> <p>d) Peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan program pemerintah yang diusulkan.</p> | Tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. | <p>a) Setiap tahun BP3K menyelenggarakan kegiatan ini.</p> <p>b) Mimbar Sarasehan bertujuan untuk mensinkronkan program pemerintah dengan rencana program penyuluhan pertanian di wilayah kerja BP3K.</p> <p>c) Peserta kegiatan terdiri dari petani, pelaku usaha pertanian dan perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten.</p> <p>d) BP3K memfasilitasi kegiatan berupa ruangan pertemuan, sarana pertemuan dan konsumsi peserta.</p> |
| 3. | Penayusunan Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan | <p>a) Petani terlibat saat draf programa penyuluhan kecamatan telah disusun oleh pihak BP3K.</p> <p>b) Penyuluh di BP3K mendampingi kami untuk menyepakati rencana kerja</p>  | Tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. | Seluruh kebutuhan penyusunan programa penyuluhan kecamatan difasilitasi oleh BP3K.   | <p>a) Petani terlibat saat draf programa penyuluhan kecamatan telah disusun oleh pihak BP3K.</p> <p>b) Penyuluh di BP3K mendampingi kami untuk menyepakati rencana kerja penyuluhan</p>   | Tidak pernah terlibat dalam kegiatan ini. | Seluruh kebutuhan penyusunan programa penyuluhan kecamatan difasilitasi oleh BP3K.   |

|    |   |   |                       |  |  |                       |  |
|----|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
|    |   | penyuluhan pertanian.<br>c) Seluruh kebutuhan pertemuan difasilitasi oleh BP3K. |                       |  | pertanian.<br>c) Seluruh kebutuhan pertemuan difasilitasi oleh BP3K.     |                       |  |
| 4. | Pengesahan Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan | Menjadi saksi pengesahan dokumen program penyuluhan pertanian kecamatan.        | Tidak pernah terlibat | Pimpinan BP3K menandatangani dokumen program penyuluhan kecamatan. | Menjadi saksi pengesahan dokumen program penyuluhan pertanian kecamatan. | Tidak pernah terlibat | Pimpinan BP3K menandatangani dokumen program penyuluhan kecamatan. |

## 2. Kinerja Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan.

Untuk mengetahui kinerja kedua BP3K dalam memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian, terlebih dahulu perlu diungkap kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang didapatkan oleh pelaku utama (petani), seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Realisasi Program Penyuluhan Pertanian yang Tercantum dalam Program Penyuluhan Pertanian di BP3K Harau dan Lareh Sago Halaban Pelaksanaan Tahun 2016**

| Kegiatan Penyuluhan menurut Permentan No.26 Tahun 2012 | Program yang Tercantum dalam Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan   |   | Realisasi Program Penyuluhan Pertanian  |  |
|--|---|---|---|--|
|  | BP3K Harau  | BP3K Lareh Sago Halaban   | Kec. Harau  | Kec. Lareh Sago Halaban  |
| 1) Pembelajaran tentang budidaya.                      | a) Peningkatan produksi padi sawah.<br>b) Pemilihan benih padi yang baik.<br>c) Penanggulangan hama dan gulma padi.<br>d) Pengairan sawah.<br>e) Teknologi budidaya padi sawah. | a) Peningkatan produksi padi sawah.<br>b) Pemilihan benih padi yang baik.<br>c) Penanggulangan hama dan gulma padi.<br>d) Pengairan sawah.<br>e) Teknologi budidaya padi sawah. | Tidak semua materi penyuluhan yang diberikan penyuluh, sama dengan yang diusulkan dalam program penyuluhan pertanian kecamatan. | Hanya sebahagian dari usulan program yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian.  |
| 2) Pembelajaran tentang pasca panen                    | Tidak Ada   | a) Cara panen padi sawah yang baik.<br>b) Pengelolaan limbah padi sawah.<br>c) Pengepakan beras yang baik   | Tidak Ada   | Sebahagian materi penyuluhan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam program.                                 |
| 3) Pembelajaran tentang pengolahan hasil panen         | Tidak ada   | Tidak ada   | Tidak ada   | Tidak ada  |
| 4) Pembelajaran tentang pemasaran.                     | Tidak ada   | Tidak ada   | Tidak ada   | Tidak ada  |
| 5) Pembelajaran tentang kepemimpinan.                  | Mengelola kelompok tani yang berkelanjutan.   | Metode membangun kelompok tani yang maju dan berkembang.  | Tidak ada penyuluhan tentang kepemimpinan.  | Materi membangun kelompok tani yang maju dan berkembang dilaksanakan oleh PPL di WKPP Nagari Balai Panjang dan Tanjung Gadang. |
| 6) Pembelajaran tentang manajemen agribisnis.          | Tidak Ada   | Tidak Ada   | Tidak Ada   | Tidak Ada  |

Sumber: Hasil wawancara informan, 2017

### 3. Kinerja menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.

Seluruh informasi di atas disebarkan dengan menggunakan beberapa instrumen penyuluhan, seperti lembar informasi, poster, brosur, buletin, alat peraga, papan pengumuman, sosialisai dan sekolah lapangan. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di BP3K Harau dan Lareh Sago Halaban terkait dengan fasilitas penyediaan dan penyebaran informasi pertanian, dapat terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kondisi Sarana Penyebaran Informasi Pertanian yang Terdapat di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban**

| Sarana Penyebaran Informasi Pertanian Menurut Permentan No.26 Tahun 2012 | Kondisinya Menurut Informan |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | BP3K Harau                  | BP3K Lareh Sago Halaban |
| <b>I. Lembar informasi:</b>  |                             |                         |
| Teknologi budidaya,  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pasca panen,   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pengolahan hasil panen,  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pemasaran, dan   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Manajamen usaha tani.  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| <b>II. Poster:</b>   |                             |                         |
| Teknologi budidaya,  | Ada                         | Ada                     |
| Pasca panen,   | Ada                         | Ada                     |
| Pengolahan hasil panen,  | Ada                         | Tidak ada               |
| Pemasaran, dan   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Manajamen usaha tani.  | Ada                         | Tidak ada               |
| <b>III. Brosur:</b>  |                             |                         |
| Teknologi budidaya,  | Ada                         | Ada                     |
| Pasca panen,   | Ada                         | Ada                     |
| Pengolahan hasil panen,  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pemasaran, dan   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Manajamen usaha tani.  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| <b>IV. Buletin:</b>  |                             |                         |
| Teknologi budidaya,  | Ada                         | Ada                     |
| Pasca panen,   | Ada                         | Ada                     |
| Pengolahan hasil panen,  | Ada                         | Ada                     |
| Pemasaran, dan   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Manajamen usaha tani.  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| <b>V. Alat Peraga:</b>   |                             |                         |
| Teknologi budidaya,  | Ada                         | Ada                     |
| Pasca panen,   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pengolahan hasil panen,  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Pemasaran, dan   | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| Manajamen usaha tani.  | Tidak ada                   | Tidak ada               |
| <b>VI. Papan Pengumuman:</b>   |                             |                         |

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Teknologi budidaya,           | Ada       | Ada       |
| Pasca panen,                  | Ada       | Ada       |
| Pengolahan hasil panen,       | Ada       | Ada       |
| Pemasaran, dan                | Ada       | Ada       |
| Manajamen usaha tani.         | Ada       | Ada       |
| <b>Lanjutan Tabel 3.</b>      |           |           |
| <b>VII. Sosialisasi:</b>      |           |           |
| Teknologi budidaya,           | Ada       | Ada       |
| Pasca panen,                  | Ada       | Ada       |
| Pengolahan hasil panen,       | Tidak ada | Tidak ada |
| Pemasaran, dan                | Tidak ada | Tidak ada |
| Manajamen usaha tani.         | Tidak ada | Tidak ada |
| <b>VIII. Sekolah Lapangan</b> |           |           |
| Teknologi budidaya,           | Tidak ada | Tidak ada |
| Pasca panen,                  | Tidak ada | Tidak ada |
| Pengolahan hasil panen,       | Tidak ada | Tidak ada |
| Pemasaran, dan                | Tidak ada | Tidak ada |
| Manajamen usaha tani.         | Tidak ada | Tidak ada |

Sumber: Reduksi hasil wawancara dengan informan, observasi dan studi dokumentasi, 2017.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar dari sarana penyediaan dan penyebaran informasi pertanian tidak tersedia di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban. Kondisi tersebut membuat pihak kedua BP3K tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyediakan dan penyebaran informasi pertanian secara maksimal.

#### 4. Kinerja Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pelaksanaan kegiatan percontohan dilakukan pada lahan milik BP3K atau lahan milik petani. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengembangkan model usaha dengan tahapan: a) Demonstrasi plot, b) Demonstrasi farm, c) Demonstrasi area, d) Demonstrasi Unit. Seluruh kegiatan tersebut didampingi oleh penyuluh pertanian yang bertugas pada wilayah kerja BP3K setempat. Untuk dapat mengetahui kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dalam memfasilitasi kegiatan ini, terlebih dahulu diidentifikasi kegiatan percontohan dan pengembangan model yang didapatkan oleh petani seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Percontohan dan Pengembangan Model yang Terdapat di BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban**

| No | Kegiatan Menurut Permentan No.26 Tahun 2012 | Kondisi di BP3K Harau |                           | Kondisi di BP3K Lareh Sago Halaban |                           |
|----|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|    |   | Pernyataan Informan   |                           | Pernyataan Informan                |                           |
|    |   | Pengurus Poktan       | Penyuluh                  | Pengurus Poktan                    | Penyuluh                  |
| 1. | Percontohan                                 | Tidak ada             | Tidak ada                 | Tidak ada                          | Tidak ada                 |
| 2. | Demonstrasi plot                            | Ada                   | Ada untuk beberapa keltan | Ada                                | Ada untuk beberapa keltan |
| 3. | Demonstrasi farm                            | Tidak ada             | Tidak ada                 | Tidak ada                          | Tidak ada                 |

|    |                  |           |           |           |           |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4. | Demonstrasi area | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 5. | Demonstrasi unit | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Sumber: Reduksi hasil wawancara informan, 2017.

Tabel di atas memperlihatkan data yang dapat menggambarkan bahwa kegiatan percontohan pengembangan model usaha tani untuk petani dan pelaku usaha yang diembankan pada BP3K tidak terlaksana dengan baik. Satu dari lima yang diamanatkan pada BP3K saja yang terlaksana oleh pihak BP3K Harau dan Lareh Sago Halaban. Satu kegiatan berupa demonstrasi demplot hanya dilakukan pada beberapa kelompok saja pada masing-masing wilayah kerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban. Fasilitas yang disediakan pihak BP3K tersebut juga masih terbatas, sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak maksimal.

## **B. Faktor yang Berkaitan dengan Kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi.**

Sebagai acuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor yang berkaitan dengan kinerja BP3K Harau dan Lareh Sago Halaban, dipinjam pendapat dari Mardikanto (2009) yang menyatakan bahwa kinerja kelembagaan penyuluh pertanian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal penyuluh, diantaranya adalah:

“ a) Karakteristik individu (penyuluh) dalam organisasi (BP3K); umur, tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi; b) Dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk BP3K; c) Dukungan sarana dan prasarana yang menunjang BP3K untuk menjalankan tugas dan fungsi; d) Pembiayaan; biaya personil penyuluh dilapangan, pengadaan perlengkapan, biaya operasional (seperti perbanyakan, pembuatan, dan penyebarluasan materi penyuluhan), biaya perkantoran di BP3K” .

Keempat faktor di atas digunakan sebagai acuan wawancara dengan informan penelitian yang berasal dari Penyuluh Pertanian dalam struktur organisasi BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban, Penyuluh, dan Penyuluh Pertanian senior dilingkup instansi terkait.

Menurut informan dalam penelitian ini, keseluruhan faktor yang dinyatakan oleh Mardikanto (2009) memang dialami oleh pihak BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban. Namun demikian, ada satu faktor lainnya yang mereka tambahkan yaitu dukungan dari pelaku utama dan pelaku usaha. Melalui Tabel 5 berikut dapat terlihat tanggapan informan tentang faktor tersebut.

**Tabel 5. Faktor yang Berkaitan dengan Kinerja BP3K dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi berdasarkan Pernyataan Penting Informan.**

| No | Pengelompok      | Faktor yang Berkaitana dengan Kinerja BP3K Harau                    | Faktor yang Berkaitana dengan Kinerja BP3K Lareh Sago Halaban |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Faktor Internal  | a) Sarana dan Prasarana   | a) Kompetensi SDM Penyuluh                                    |
|    |                  | b) Kompetensi SDM Penyuluh  | b) Sarana dan Prasarana                                       |
| 2. | Faktor Eksternal | c) Dukungan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian dari pemerintah daerah. | c) Dukungan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian                   |

|  |  |                    |                         |
|--|--|--------------------|-------------------------|
|  |  |                    | dari pemerintah daerah. |
|  |  | d) Dukungan Petani | d) Dukungan Petani      |

Sumber: Interpretasi hasil wawancara informan, 2017.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel di atas, dapat dijabarkan penjelasan mengenai faktor yang berkaitan dengan kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan amanat Permentan Nomor 26 tahun 2012.

#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didaptkandari penelitian ini adalah: Kinerja BP3K Harau dan BP3K Lareh Sago Halaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan amanat Permentan Nomor 26 Tahun 2012 berada pada kondisi yang masih rendah, terlihat hanya satu dari enam tugas yang dapat dijalani dengan baik yaitu memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan sedangkan kelima tugas lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua BP3K. Beberapa faktor yang membuat rendahnya kinerja tersebut, diantaranya adalah: a) Faktor internal seperti masih terbatasnya kompetensi SDM Penyuluh Pertanian yang ada di kedua BP3K dan masih minimnya dukungan sarana, prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh kedua BP3K tersebut; b) Faktor eksternal seperti dukungan pembiayaan penyuluhan pertanian oleh pemerintah daerah dan dukungan dari pelaku utama (petani) dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah kerja BP3K.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2014. Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Jakarta.
- Ban & Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Creswell, J.W. 2009. Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
- Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta Selatan.
- Kartasapoetra, G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta
- Leeuwis, C. 2009. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan Berfikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Lesmana, D. 2007. Kinerja Balai Penyuluhan di Kota Samarinda. Jurnal EPP Vol.4 No.2, hal 24-31.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. LPP UNS dan UNS Press. Surakarta, Jawa Tengah.
- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- RI. 2012. Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Soekartawi. 2005. Prinsip dasar Komunikasi Pertanian. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.